

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan suatu daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerangka kebijakan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada permasalahan dan karakteristik wilayah yang terkait. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah relatif berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah lain. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik sumber daya fisik dan nonfisik. Perbedaan potensi dan karakteristik sumber daya tersebut menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar daerah maupun antar sektor. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat sentralistik menuju desentralistik.

Merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan kapasitas daerah dan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi di atas maka otonomi daerah diharapkan bisa menjadi suatu solusi bagi permasalahan yang ada di daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu serta alokasi besaran investasi sebagai sumber-sumber ketimpangan dapat dinetralisir oleh kewenangan pemerintah daerah dengan penerapan konsep otonomi daerah.

Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjalankan otonomi daerah sejak tahun 2001. Sejalan dengan semangat otonomi daerah Provinsi Lampung dituntut untuk melakukan pembenahan dan pengembangan potensi-potensi lokal secara produktif serta menetapkan kebijakan yang menitikberatkan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam rangka merespon undang-undang tentang otonomi daerah, adalah dengan memekarkan wilayah kabupaten/ kota yang sebelum otonomi daerah jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebanyak 4 kabuapten/kota, maka setelah pelaksanaan otonomi daerah bertambah menjadi 15 kabupaten/kota. Tujuan pemekaran wilayah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Hingga saat ini struktur perekonomian daerah Lampung secara umum masih didominasi oleh sektor pertanian. Gambaran tentang struktur perekonomian Provinsi Lampung lima tahun terakhir sejak diberlakukannya otonomi daerah seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB Provinsi Lampung (persentase)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata ²
1	Pertanian	38,89	36,82	35,56	35,92	35,54	37,00
2	Pertambangan dan Penggalian	2,09	1,99	2,09	1,96	2,04	2,20
3	Industri Pengolahan	14,07	15,79	16,07	15,55	15,52	15,00
4	Listrik, Gas dan Air bersih	0,58	0,55	0,54	0,55	0,56	0,60
5	Bangunan	4,21	3,66	3,44	3,36	3,16	3,70
6	Perdag, hotel dan Restoran	13,44	15,25	16,01	15,86	15,94	15,00
7	Pengangkutan dan Telekom.	9,90	10,16	11,51	11,54	11,76	10,70
8	Keu, Persewaan & Jasa Persh	6,67	6,31	5,97	6,15	6,22	6,30
9	Jasa-jasa	10,15	9,46	8,82	9,11	9,27	9,50

Sumber: BPS Provinsi Lampung, beberapa terbitan

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung masih di dominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian kemudian diikuti sektor sekunder yaitu industri pengolahan dan sektor tersier (jasa-jasa). Dominannya sektor primer disebabkan besarnya kontribusi sektor pertanian yang mencapai rata-rata 37 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

Terkonsentrasinya perekonomian Provinsi Lampung pada satu sektor saja menyebabkan kondisi perekonomiannya secara sektoral mengalami stagnan, dimana rata-rata tingkat pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan adalah komoditas primer sehingga memiliki daya saing yang rendah di pasaran. Sebagai akibatnya pendapatan yang diterima masyarakat menjadi rendah. Gambaran tentang pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan per kapita Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013 (juta rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Lampung Barat	6.15	6.74	7.98	9.18	9.85
2	Tanggamus	7.88	8.94	10.21	11.85	14.10
3	Lampung Selatan	9.88	11.16	12.64	14.72	16.45
4	Lampung Timur	9.48	10.95	12.26	13.69	15.08
5	Lampung Tengah	11.75	14.18	16.29	18.4	20.60
6	Lampung Utara	11.40	13.91	17.60	21.20	24.06
7	Way Kanan	6.32	7.40	8.46	9.68	10.81
8	Tulang Bawang	12.23	14.22	16.03	18.74	21.84
9	Pasawaran	10.45	12.61	14.53	16.52	18.47
10	Pringsewu	6.97	8.15	9.30	10.50	11.80
11	Masuji	10.47	12.81	15.53	18.04	20.84
12	Tulang Bawang Barat	14.07	15.65	16.96	19.25	21.90
13	Bandar Lampung	19.63	21.95	24.67	27.66	30.93
14	Metro	7.16	7.98	8.88	9.96	11.50
	Provinsi Lampung	11.82	14.24	16.70	18.61	20.72

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2014.

Selain itu dominannya sektor pertanian juga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan antar wilayah. Besarnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Lampung ternyata tidak banyak membawa pengaruh untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Ketiadaan industri pengolahan hasil pertanian di Provinsi Lampung menyebabkan hampir seluruh hasil pertanian dikirim keluar Provinsi Lampung tanpa melalui proses produksi.

Desentralisasi fiskal sebagai wujud otonomi daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah saatnya tidak terlalu mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengatur keuangannya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adanya inisiatif pemerintah daerah mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Meningkatnya pembangunan di daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah yang terjadi.

Pembangunan daerah dalam jangka panjang harus dapat menjadi suatu usaha untuk menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional sehingga diharapkan kedepannya daerah otonom dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir sejak diberlakukannya otonomi daerah sangat fluktuatif. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional, nampak pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional dan relatif mengalami stagnan sejak pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun mengalami pertumbuhan, namun

pertumbuhannya relatif lambat. Fluktuatifnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor pertanian. Seluruh sumbangan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Lampung berasal dari hasil produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Besar atau kecilnya persentase kenaikan maupun penurunan sub sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan sangat ditentukan oleh kondisi alam seperti cuaca dan pengetahuan petani.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Dirinci menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013 (Persentase)

No	SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2,63	1,07	4,96	4,20	3,95
2	Pertambangan & Penggalian	-9,21	-3,38	13,48	2,28	10,66
3	Industri Pengolahan	5,88	6,11	4,88	4,39	7,56
4	Listrik, Gas & Air Bersih	2,84	10,41	9,86	10,51	10,05
5	Bangunan	4,87	3,71	7,77	5,82	2,50
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,60	4,78	5,50	5,59	4,70
7	Pengangkutan & Komunikasi	11,47	15,42	12,98	13,63	7,83
8	Keu, Persewaan, & Jasa Perush.	12,91	26,88	7,48	12,44	9,48
9	Jasa-Jasa	5,59	5,59	8,24	9,42	9,39
	PDRB non migas	5,52	6,02	6,44	6,54	5,95
	PDB Indonesia non migas	5,00	6,60	6,98	6,85	6,25

Sumber: BPS Provinsi Lampung, beberapa terbitan

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa PDRB Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan kondisi yang demikian ternyata belum memberikan manfaat yang lebih besar kepada perekonomian Provinsi Lampung. Hal ini terlihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat Provinsi Lampung yang masih relatif masih rendah dan cenderung mengalami ketimpangan antar kabupaten/kota. Atas dasar inilah maka perlu suatu analisis untuk melihat besarnya ketimpangan antar wilayah yang terjadi dan analisis identifikasi sektor-sektor basis yang mampu menjadi tumpuan perekonomian Provinsi Lampung.

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Lampung pada periode lima tahun terakhir (2009 – 2013) setelah pemberlakuan otonomi daerah ?
2. Bagaimana ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung pada periode lima tahun terakhir (2009 -2013) setelah pemberlakuan otonomi daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor basis yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir.
2. Menganalisis ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis mengenai perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Bagi mahasiswa dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah dan penentuan sektor basis bagi suatu daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat menjadi bahan masukan dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi yang ada.

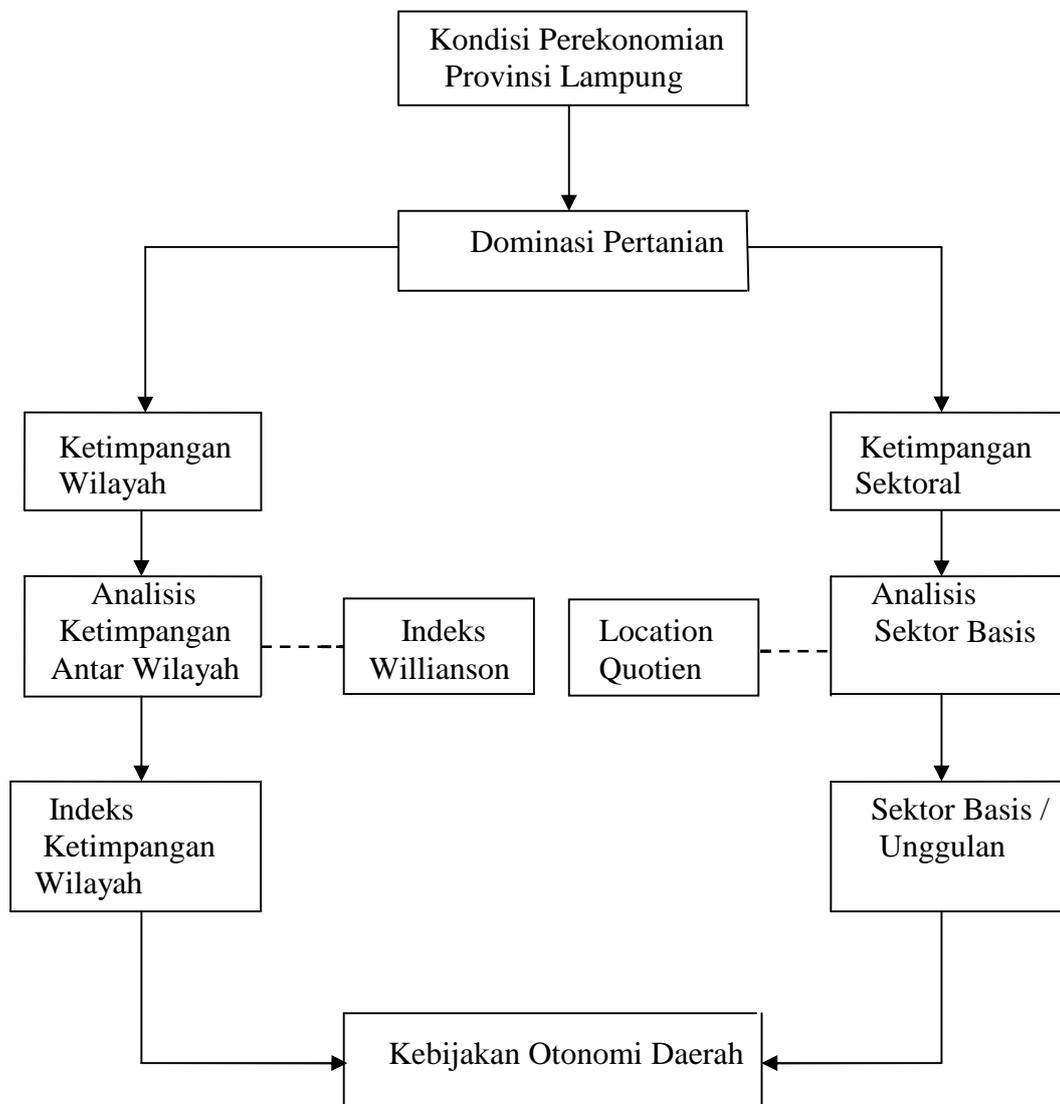
E. Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar akan mampu mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Perekonomian Provinsi Lampung yang didukung dengan sumber daya alam besar ternyata belum diimbangi dengan penyediaan sumber daya yang handal. Akibatnya potensi-potensi ekonomi belum termanfaatkan secara optimal. Perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, sehingga potensi-potensi ekonomi yang lain belum terlihat peranannya terhadap perekonomian Lampung. Adanya otonomi daerah, dimana kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya sangat luas, namun sektor-sektor ekonomi yang ada belum mampu dioptimalkan, dimana struktur perekonomian Provinsi Lampung sebagian besar kontribusinya berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan data statistik sumbangan sektor pertanian pada perekonomian semakin menurun, karena keberadaannya tidak banyak memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor yang lain di provinsi lampung.

Adanya dominasi sektor pertanian menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan secara sektoral. Untuk mengetahui besarnya

ketimpangan wilayah ini dilakukan analisis dengan indeks Williamson. Ketimpangan sektoral yang ada tampak sangat besar akibat dominasi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Lampung. Untuk dapat mengetahui potensi sektor- sektor ekonomi maka dilakukan analisis dengan menggunakan *Location Quotient*. Jadi analisis dilakukan dengan memisahkan adanya peranan sektor pertanian dan tidak memperhitungkan sektor pertanian sehingga akan didapatkan sektor-sektor unggulan yang lain selain sektor pertanian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran